

Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember

Palupi Widyaswara¹, Anastasia Murdyastuti², Abul Haris Suryo Negoro³
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

E-mail: palupi.widyaswara@gmail.com

Abstract

The government has responsibility to empower the community, one form of which is empowering former migrant workers, so that former migrant workers can be more independent and develop their potential or abilities, and they do not need to go overseas and work as migrant worker ever again. The Dukuhdempok government carries out this responsibility by forming Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) as a forum that facilitates the government in carrying out empowerment. This research aims to describe the role of the Local Government in Empowering Former Migrant Workers through Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) in Dukuhdempok Village. The method used is a qualitative-descriptive method by observation, in-depth interviews, and documentation. The results showed that the Dukuhdempok Village Government carried out its role as an enabler where empowerment was held by increasing the ability, capacity, and capability of former migrant workers through DESBUMI by providing training, providing facilities, and also providing capital.

Keywords: *Local Government, role, empowerment, former migrant worker, DESBUMI*

1. Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia mungkin lebih akrab dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu pekerjaan yang digeluti masyarakat. Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember merupakan salah satu desa yang beberapa waktu lalu mendapatkan julukan ‘lumbung TKI’ karena banyaknya warga yang bekerja sebagai pekerja migran. Tidak seperti yang kebanyakan orang kira, banyaknya jumlah pekerja migran yang berasal dari Dukuhdempok ini bukan hanya karena permasalahan ekonomi. Berdasarkan observasi awal, wawancara bersama Ketua DESBUMI Dukuhdempok pada 1 Februari 2022 menunjukkan bahwasanya penyebab seseorang memutuskan bekerja sebagai pekerja migran selain karena tuntutan ekonomi, permasalahan internal keluarga merupakan salah satu faktor terbesar, tidak jarang ditemukan calon pekerja migran yang ingin pergi ke luar negeri karena diminta oleh suaminya, karena suaminya berselingkuh, atau tidak akur dengan mertua.

Permasalahan tersebut tentunya hanya merupakan sebagian dari berbagai permasalahan lain yang berkaitan dengan pekerja migran. Permasalahan yang sering

ditemui dalam berita adalah pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja migran selama mereka melaksanakan kontrak kerja. Tidak jarang seorang pekerja migran yang mengalami pelanggaran HAM tersebut hingga harus kehilangan nyawa karena tidak bisa meminta atau tidak tahu harus kemana untuk mendapatkan pertolongan. Permasalahan tersebut dapat disebabkan karena keberangkatan mereka yang ilegal, dimana data mereka tidak terekam pada Kementerian Ketenagakerjaan maupun pada kedutaan negara setempat, sehingga untuk melaporpun mereka kemungkinan terbaik hanya akan dipulangkan ke Indonesia.

Selain permasalahan yang terjadi pada saat sebelum dan selama kontrak berjalan, permasalahan setelah kontrak selesai juga terjadi. Penuturan Ketua DESBUMI, Jumiatur, S.Pd pada wawancara observasi awal menunjukkan bahwasanya pekerja migran yang mayoritas bekerja sebagai asisten rumah tangga, saat kepulangan kesulitan untuk mengelola hasil yang mereka dapatkan, sehingga kondisi perekonomian DESBUMI berhasil memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, salah satunya adalah Hassan Wirajuda Pelindungan Awards pada tahun 2020 yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kontribusi besar dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang peran pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan mantan pekerja migran melalui Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

Administrasi Publik

Terdapat berbagai pengertian mengenai Administrasi Publik salah satunya adalah menurut Chandler dan Plano dalam (Pasolong 2016:7) yang menyatakan bahwa Administrasi Publik merupakan suatu bentuk seni dan ilmu yang bertujuan guna mengatur permasalahan publik atau *public affairs* dan berbagai tugas yang telah ditentukan. Administrasi Publik memiliki tujuan untuk memecahkan berbagai permasalahan publik melalui perbaikan-perbaikan terutama pada bidang organisasi, sumber daya manusia, dan ekonomi.

New Public Management

Perkembangan ilmu Administrasi turut memunculkan berbagai paradigma baru, memasuki tahun 1980, muncul *New Public Management* yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler dalam (Alamsyah, 2016:182). Paradigma ini muncul karena berbagai krisis seperti kemiskinan, buta huruf, tingginya biaya medis, birokrasi pemerintah yang terlalu rigid, sentralis, dan lamban dalam mengatasi masalah yang juga berdampak pada terhambatnya kreativitas dan melemahkan energi pegawai.

Peran

Peran diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki jabatan untuk meningkatkan kemandirian mantan pekerja migran.

Pemberdayaan

Pengertian mengenai pemberdayaan menurut Suharto (2014:59-60) dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemberdayaan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan lebih mengarah pada hasil yang ingin dicapai dari suatu perubahan sosial, hasil ini dapat berupa masyarakat yang lebih berdaya, memiliki kekuasaan atas hidupnya, atau memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan hidupnya. Sesuai dengan pengertian peran pemerintah dalam pemberdayaan sebagai *enabling* menurut Ndraha (dalam Alaina 2016:6), pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* yang secara masing-masing diartikan sebagai berikut.

a. *Ability*

Ability menurut Robbins (dalam Wibowo 2013:93) diartikan sebagai kapasitas individu untuk mewujudkan berbagai tugas dalam pekerjaan, dimana kemampuan ini terbentuk dari dua faktor yaitu *intelektual ability* yang merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental (berpikir, menalar, dan memecahkan masalah); dan *physical ability* yang merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas fisik yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa.

b. *Capacity*

Morgan (dalam Soeprapto 2010:10) mengartikan *capacity* sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dalam

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan fokus pada peran DESBUMI Dukuh Dempok dalam upaya pemberdayaan mantan pekerja migran.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan merupakan instrumen penting dalam penelitian kualitatif, untuk itu telah dipilih informan terbaik yang dapat memberikan data yang sesuai untuk penelitian, diantaranya adalah Penanggung Jawab yaitu Kepala Desa

Dukuhdempok; Pelaksana yaitu Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Dukuhdempok, Pengurus *Migrant Care* Kabupaten Jember, Ketua DESBUMI Dukuhdempok; dan sasaran yaitu anggota DESBUMI Dukuhdempok.

Data yang telah diperoleh kemudian diuji keabsahannya dengan metode triangulasi, yang menurut Moleong (2019:330) diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding kedua data tersebut. Data yang telah diuji keabsahannya kemudian dianalisis menggunakan analisis data model interaktif.

3. Hasil dan Diskusi

Sebelumnya telah dibahas bahasanya pemerintah dapat melaksanakan perannya dalam memberikan pemberdayaan melalui peningkatan *ability*, *capacity*, dan *capability*, berdasarkan hal tersebut, maka berikut adalah gambaran bagaimana pemerintah desa melaksanakan perannya dalam memberdayakan mantan pekerja migran melalui DESBUMI Desa Dukuhdempok.

Ability

a. *Intellectual Ability*

Pemerintah Desa Dukuhdempok melaksanakan peran pemberdayaan dengan meningkatkan *ability* melalui pembentukan DESBUMI sebagai upaya untuk meningkatkan *intellectual ability* yang ditujukan agar sasaran yaitu mantan pekerja migran mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam berfikir, menalar, dan memecahkan masalah dengan berorganisasi.

Setelah pembentukan DESBUMI, mantan pekerja migran menentukan sendiri siapa yang memiliki tanggung jawab sebagai pengurus dan tugas apa yang harus mereka laksanakan. Selain itu, mereka juga diberikan tanggung jawab untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, baik secara internal maupun eksternal. Namun, meskipun begitu, pemerintah desa tetap memberikan bantuan dan bimbingan apabila terjadi permasalahan di luar kapasitas DESBUMI.

b. *Physical Ability*

Physical ability merupakan kemampuan yang berkaitan dengan stamina, kekuatan, dan keterampilan. Pemerintah Desa Dukuhdempok melaksanakan peran pemberdayaan dalam peningkatan *physical ability* hanya berfokus pada keterampilan, dimana pemerintah memberikan berbagai pelatihan keterampilan yang ditujukan agar sasaran mantan pekerja migran mampu memaksimalkan potensi dan keahlian yang mereka miliki untuk membantu dirinya sendiri menjadi lebih mandiri. Pelaksanaan pelatihan diberikan secara bertahap, dalam berbagai bentuk, dan juga dilaksanakan dengan kerja sama dengan dalam sub bab *ability* dimana ketiga hal tersebut dilakukan dengan membentuk DESBUMI dan memberikan berbagai pelatihan keterampilan kepada mantan pekerja migran.

c. Peningkatan sikap, nilai-nilai, hubungan, dan perilaku.

Pada poin ini, Pemerintah Desa Dukuhdempok hanya berfokus pada nilai-nilai dan hubungan, dimana pada pelaksanaannya pemerintah memutuskan dalam DESBUMI keanggotaannya merupakan mantan pekerja migran ataupun keluarga yang berkenan tanpa adanya paksaan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keeratan hubungan antar anggota, sehingga keeratan organisasi terjaga dan pelaksanaan pemberdayaan menjadi lebih mudah dan maksimal.

Anggota yang memiliki pandangan yang sama dan saling memiliki perasaan yang memahami satu sama lain karena mereka sama-sama pernah menjadi pekerja migran atau ditinggalkan anggota keluarga yang bekerja sebagai pekerja migran juga turut meningkatkan semangat sasaran untuk menjadi individu yang lebih mandiri melalui pemberdayaan yang mereka dapatkan.

Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Desa Dukuhdempok melaksanakan kewajibannya dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran bekerja sama dengan *Migrant Care* Kabupaten Jember membentuk Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) sebagai organisasi yang berbasis pelayanan sekaligus wadah bagi mantan pekerja migran untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui pemberdayaan oleh pemerintah desa. DESBUMI beranggotakan mantan pekerja migran dan keluarga asal Dukuhdempok yang berkenan, dan berkegiatan dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.

Pembentukan DESBUMI juga dibarengi dengan dikeluarkannya Peraturan Desa No 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Warga Desa Dukuhdempok dan Anggota Keluarganya sebagai payung hukum sah yang akan memudahkan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran asal Desa Dukuhdempok. Setelah lebih dari tiga tahun berjalan, Pemerintah Desa Dukuhdempok bersama atau kedudukan dalam suatu masyarakat. (Poerwodarminta dalam Mawitjere, Pioh, & Kasenda, 2018:3). Pengertian lain datang dari Lewinson dalam Soekanto (2009) (dalam Trisnani 2014:35) yang mengartikan peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kedudukannya dalam suatu masyarakat. Penelitian ini akan berfokus pada peran pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan mantan pekerja migran melalui DESBUMI Desa Dukuhdempok.

d. Motivasi, sumber daya, kondisi memungkinkan

Peningkatan atau pemberian motivasi dilakukan oleh pemerintah desa sejak awal pembentukan DESBUMI hingga saat ini selama DESBUMI masih berjalan, khususnya pada saat pelatihan keterampilan. Seperti pelatihan keterampilan yang diberikan tidak hanya oleh pihak pemerintah desa, pemberian motivasi juga

diberikan oleh berbagai pihak yang melakukan kerja sama dengan pemerintah desa untuk memberikan pelatihan dan membantu mensukseskan pemberdayaan mantan pekerja migran.

Sumber daya yang diberikan oleh pemerintah desa terbagi menjadi dua, yang pertama adalah sumber daya manusia yang merupakan pemberi materi di setiap pelatihan. Pemerintah selalu mendatangkan ahli yang sesuai dengan materi pelatihan yang diadakan agar pelaksanaan pelatihan lebih maksimal. Hal tersebut juga merupakan salah satu alasan mengapa pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah, yaitu untuk mendapatkan pemateri terbaik. Sumber daya yang kedua adalah sumber daya fisik atau materil. Pemerintah memberikan sumber daya ini dalam bentuk fasilitasi dan juga pemberian modal. Berikut adalah beberapa fasilitas yang didapatkan oleh mantan pekerja migran dari berbagai pelatihan yang diberikan.

Tabel 2. Daftar Inventaris DESBUMI Dukuhdempok

No	Nama Barang	Asal	Keterangan
1	Wajan, timba	Migrant Care	Di anggota (Tbu Marfuah)
2	Komputer A		Di Outlet
3	Etalase besar, meja		DESBUMI
4	Mesin overdesk	Migrant Care dan dana kelompok	
5	Etalase kecil, almari, meja, peralatan membatik	Pemerintah Desa	Di Kantor PPT DESBUMI
6	Spinner, sealer	Dukuhdempok	Di anggota (Tbu Sundari)
7	Cetakan opak gulung		Di anggota (Tbu Mujayanah)
8	Kompor gas, ember, wajan, panci, spatula, timba, blender, oven, mixer		Di anggota (Tbu Marfuah)
9	Komputer B, kulkas, juicer, bekam konveksi	Kemnaker	Di Outlet DESBUMI
10	Komputer C, printer, alat sablon, 12 mesin jahit butterfly, 6 mesin jahit juki, 2 mesin obras, 2 mesin bordir, 1 mesin itak, 40	Desmigratif	Mesin jahit sebagian dipinjamkan kepada anggota, dan sebagian

Sumber: Divisi Data dan Informasi DESBUMI Dukuhdempok

Selain itu, pemerintah desa juga memberikan fasilitas berupa gedung kantor dan *outlet* yang digunakan untuk kegiatan operasional DESBUMI sehari-hari dan memasarkan produk yang mereka buat. Kedua gedung tersebut berlokasi di Kantor Desa Dukuhdempok.

Permodalan atau pendanaan dari pemerintah desa berasal dari dana desa yang merupakan alokasi untuk kesejahteraan masyarakat. Pendanaan ini digunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan fasilitas bagi mantan pekerja migran.

Terdapat alokasi yang juga diberikan secara tunai, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pihak DESBUMI lebih menyukai apabila mereka diberikan dalam bentuk pelatihan ataupun fasilitas.

Setelah menerima berbagai bentuk pelatihan yang juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung serta permodalan, kondisi mendukung merupakan poin terakhir dalam mensukseskan pemberdayaan dengan meningkatkan *capacity*. Penciptaan kondisi mendukung ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Dukuhdempok salah satunya dengan mengenalkan berbagai produk buatan DESBUMI ke pasar yang lebih luas dan memiliki kekuasaan, contohnya adalah kepada tamu-tamu pemerintahan yang datang ke kantor desa, pemerintah desa akan selalu mempromosikan produk dari DESBUMI seperti batik, ekstrak jahe, dan berbagai produk makanan kering lainnya.

Selain mempromosikan produk buatan DESBUMI, pemerintah desa juga sempat membeli *hazmat* yang diproduksi mantan pekerja migran pada masa pandemi dalam jumlah yang besar hingga ratusan pcs. Baju *hazmat* tersebut kemudian diberikan sebagai sumbangan untuk puskesmas, polsek, dan koramil setempat. Hal tersebut ditujukan selain untuk membantu pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan penanganan *covid-19* juga untuk membantu DESBUMI kembali mendapatkan pemasukan, karena selama pandemi tidak ada bazaar tempat mereka biasa menjajakan produk dan tingkat konsumsi masyarakat menurun.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, Pemerintah Desa Dukuhdempok melaksanakan peran pemberdayaan dalam peningkatan *capacity* dengan memanfaatkan pembentukan DESBUMI yang di beranggotakan mantan pekerja migran dan keluarga yang berkenan untuk memberikan pelatihan sekaligus mereka belajar untuk berorganisasi. Setelah memberikan pelatihan, pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas pendukung dan permodalan atau pembiayaan agar ilmu yang telah didapatkan dari pelatihan tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Pemerintah juga tidak hanya berhenti sampai sasaran mampu memproduksi sesuatu, karena dukungan terus diberikan dengan mengenalkan produk-produk buatan sasaran ke pasar yang lebih luas.

Capability

Capacity menunjukkan kemampuan khusus yang dapat digunakan dalam tujuan kompetitif. Pemerintah Desa Dukuhdempok meningkatkan kemampuan mantan pekerja migran sebagai sasarannya melalui berbagai pelatihan, dan pemberian fasilitas seperti yang sebelumnya telah dibahas. Hasil dari berbagai pelatihan tersebut ternyata dapat dilihat dari masing-masing anggota DESBUMI yang telah memiliki usaha mandiri, Ketua DESBUMI yang mendapat penghargaan dari presiden termasuk dalam Perempuan Akar Rumput, dan pemerintah desa yang memenangkan penghargaan HWP pada 2020.

Berbagai hal tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah desa menjadikan sasaran dan pelaksana pemberdayaan memiliki kemampuan khusus yang dapat bersaing.

4. Kesimpulan

Pemerintah Desa Dukuhdempok melaksanakan peran dalam pemberdayaan sebagai *enabler* yaitu dengan meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* sasarannya yang merupakan mantan pekerja migran melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian fasilitas, dan permodalan. Pelaksanaan peran pemberdayaan sebagai *enabler* dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembentukan DESBUMI sebagai organisasi berbasis pelayanan yang juga digunakan sebagai wadah bagi mantan pekerja migran untuk mendapatkan berbagai pelatihan dan fasilitas yang diberikan pemerintah desa. Pemberian pelatihan dan fasilitas dilakukan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan berbagai pihak baik swasta maupun sesama pemerintah. Upaya pemberdayaan yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang positif dengan telah menunjukkan hasil yang positif.

Daftar Pustaka

- Alaina, L. (2016). Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tv Kabel di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(1).
- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4,172-199.
- Barker & Sikula. (2005). *The Complementary Effects of Market. Orientation and Entrepreneurial Orientation on Profitability in Small*.
- BP2MI, P. D. (2022, Juli). *Statistik Perlindungan dan Penempatan*. Dipetik 11 Agustus, 2022, dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>
- Mawitjere, R.M., Pioh, N., & Kasenda, V. (2018). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Desa Dukuhdempok No 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Warga Desa Dukuhdempok dan Anggota Keluarganya

Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 231-236.

Soekanto, S. (2012). *Suatu Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.

Soeprapto. (2010). *Pengembangan Kapasitas pemerintah Daerah. Mejuju Good Government*. Malang: Erlangga.

Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

